

Pemerintah Bebaskan Lahan Tol Trans-Sumatera

JAKARTA – Pemerintah akan membebaskan lahan untuk pembangunan tol Trans-Sumatera dengan mengacu pada Undang-Undang (UU) No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Proses ini akan melibatkan peran aktif Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah.

“Pembebasan lahannya akan dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Nanti tinggal *sharing* saja, tetapi porsi untuk pemda lebih kecil, sebagian besar pasti pemerintah pusat,” ungkap Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto di Jakarta, Jumat (22/2).

Menurut dia, kebutuhan pembiayaan pembebasan lahan ini dipastikan akan besar lantaran tol Trans-Sumatera ini memiliki panjang mencapai 2.696 kilometer (km). Biaya pembebasan lahan ini akan masuk dalam anggaran Kementerian Pekerjaan Umum.

“Dananya besar sekali, berapa triliun untuk pembebasan lahan kalau memang mau. Ini suatu yang harus kami kerjakan dengan baik,” kata Djoko.

Kendati demikian, proses pembebasan lahan tol Trans-Sumatera ini bergantung dari kesiapan dari pemerintah, mulai dari pendanaan, perencanaan, dan perizinan. Setelah perencanaan rampung, diserahkan ke gubernur dan akan ditindaklanjuti untuk proses ke publik. Kalau publik setuju, lalu gubernur menge-

luarkan surat persetujuan penetapan lokasi proyek (SP2LP).

Setelah itu, gubernur menyerahkan pembebasan lahan ke BPN. Lembaga negara itu menjadi ujung tombak pembebasan lahan sesuai UU No 2/2012. “Dari BPN sendiri harus sudah siap, *kan* UU baru menyebutkan semua *take the lead* adalah BPN. Kami ini membayar saja sesuai progres dari BPN,” tutur Djoko.

Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum Danis H Sumadilaga mengungkapkan, ada tujuh koridor jalan tol Trans Sumatera yang terbagi sebagai jalan utama dan prioritas. Keempat koridor utama jaringan jalan tol itu melalui Lampung-Palembang sepanjang 358 kilometer (km), Palembang-Pekanbaru (610 km), Pekanbaru-Medan (548 km), dan Medan-Banda Aceh (460 km). Investasi pengerjaan empat koridor jalan tol sepanjang 1.976 km itu diestimasikan sekitar Rp 298 triliun.

Adapun tiga koridor prioritas antara lain adalah jalan Palembang-Bengkulu (303 km), Pekanbaru-Padang (242 km), dan Medan-Sibolga (175 km). Total tiga jalan prioritas ini adalah 720 km dengan estimasi investasi Rp 128 triliun.

Menurut Danis, dari keempat koridor jalan tersebut yang layak dibangun terlebih dahulu adalah koridor jalan Lampung-Palembang dan jalan Pekanbaru-Medan. Hal itu dikarenakan arus lalu lintas di kedua ruas jalan tersebut lebih tinggi dibanding lainnya. (ean)